

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

¹ Yayat Hidayat

hidayat_uninuss31714@yahoo.com

Diterima Juni 2019	Disetujui Juli 2019	Dipublikasikan Agustus 2019
--------------------	---------------------	-----------------------------

Abstrak: Penelitian ini mengungkapkan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan non formal pada pusat kegiatan belajar masyarakat di kota Bandung, yang ditinjau dari kebijakan, implementasi, dan pola pembinaan, faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan pembinaan, serta upaya ke depan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM di kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan angket. Ditinjau dari kebijakan ternyata kurang berorientasi untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM di kota Bandung, ditinjau dari pola pembinaan ternyata bidang PNFI dalam hal ini termasuk penilik kesetaraan kurang melakukan pembinaan terhadap PKBM. Ditinjau dari faktor penghambat pembinaan selain dukungan dana dari APBN dan APBD yang minim, dan jumlah penilik kesetaraan yang terbatas, hal itu nampak dari jumlah lima orang penilik kesetaraan yang harus membina masing-masing lima kecamatan yang tersebar pada 31 kecamatan di kota Bandung. Sedangkan dampak kebijakan yang kurang berorientasi meningkatkan mutu PKBM adalah rendahnya mutu pendidikan non formal terhadap PKBM yang berimplikasi kurangnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan non formal pada PKBM di kota Bandung.

Kata Kunci: manajemen, pendidikan non formal, PKBM

This study reveals about the management quality improvement of education non-formal learning centers in the city, which in terms of policy, implementation, and patterns of development, supporting factors and factors inhibiting the implementation of coaching, as well as the effort forward to improve the quality of non-formal education to CLC in the city's Bandung. Penelitian using qualitative methods. The data collection techniques such as observation, interviews, and questionnaires. Judging from the policy turned out to be less oriented to improve the quality of non-formal education to the CLC in the city, in terms of pattern formation PNFI turns in this field including equality overseers less supervision to CLC. Judging from the development inhibiting factors besides financial support from state and local budgets are minimal, and the amount of equity overseers limited, it appears from the number five overseers who must foster equality of each of the five districts spread over 31 districts in the city Bandung. While impact policies that are less oriented to improve the quality CLC is the low quality of non-formal education to the CLC that implicates his lack of trust of government and society towards non-formal education in the CLC in the city of Bandung.

¹ Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bandung Raya (UNBAR) Bandung

Keywords: *management, non-formal education, PKBM*

PENDAHULUAN

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Implementasi dari pasal tersebut tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan : jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan in formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 6, menyatakan sebagai berikut : Hasil pendidikan non formal setara dengan pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (SNP).

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara lingkungan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari proses pendidikan secara tidak langsung menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pendidikan masyarakat.

PKBM yang ada di Jawa Barat menurut data dari subdin PLS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seluruhnya berjumlah 721. Sedangkan jumlah PKBM di kota Bandung ada 94 PKBM (Data dari bidang PNFI tahun 2013).

Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, sedangkan perhatian pada pendidikan non formal sangat terbatas. Hal ini sesuai fakta pada dinas pendidikan kota

Bandung bidang PNFI tahun 2013 dan kondisi di lapangan yang dapat dijadikan informasi untuk penulis, yaitu: (1) Pengelolaan pendidikan non formal dalam hal ini PKBM belum optimal dan belum efektif, (2) Kesenjangan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, tentang implementasi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pendidikan non formal yang belum memenuhi standar nasional pendidikan, (3).Pengembangan program PKBM belum dilaksanakan secara maksimal, implementasinya sebagian besar warga belajar belum mendapat keterampilan kerja untuk bekal kehidupan di masyarakat yang lebih baik. (4)Hasil atau lulusan dari PKBM belum memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat. Maka berdasarkan kenyataan tersebut peneliti tertarik untuk memilih judul tentang "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Bandung".

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa menurut Terry (1986: 14) terdapat empat fungsi manajemen, yaitu: (1) planning (perencanaan); (2) organizing (pengorganisasian); (3) actuating (pelaksanaan); dan (4) controlling (pengawasan). Sedangkan menurut Fayol (1994: 14) terdapat lima fungsi manajemen, meliputi : (1) planning (perencanaan); (2) organizing (pengorganisasian); (3) commanding (pengaturan); (4) coordinating (pengkoordinasian); dan (5) controlling (pengawasan).

Untuk memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan, di bawah akan dipaparkan

tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran Terry (1986: 14), meliputi: (1) perencanaan (*planning*); (2) pengorganisasian (*organizing*); (3) pelaksanaan (*actuating*) dan (4) pengawasan (*controlling*).

Kaitannya dengan pendidikan non formal, menurut Kinder Vatter (1984) merupakan suatu metoda penerapan kebutuhan, minat orang dewasa dan pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup.

Kinder Vatter mengusulkan tentang pendidikan non formal itu sebagai "empowering process". *Empowering process* adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

Program pembelajaran dalam empowering process dirancang untuk memberi kesempatan kepada para anak putus sekolah, dengan menganalisis keadaan kehidupan mereka bertujuan untuk, mengembangkan keterampilan yang dikehendaki agar dapat merubah keadaan kehidupan mereka di masyarakat lebih baik.

Adapun PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan penguasaan terhadap ilmu

pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi peserta didik/ warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada disekitar lingkungannya (Sihombing: 2002).

PKBM merupakan tempat belajar di luar sistem persekolahan, warga belajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan siap kerja dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana upaya dinas pendidikan bidang PNFI melalui kebijakan dan program pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM di kota Bandung.

METODE

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif tentang "Manajemen Peningkatan Mutu pendidikan Non Formal pada PKBM di Kota Bandung". Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif.

Menurut Trisnamansyah (2009:104) pendekatan kualitatif adalah " Pendekatan yang diarahkan dalam memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut prespektif partisipan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, format isian (angket) dan studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ketua PKBM, ketua forum PKBM, kepala UPT Pendidikan, penilik kesetaraan, kepala seksi PAUD dan Kesetaraan

serta kepala bidang pendidikan non formal in formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Program

Pembinaan Bidang PNFI

Kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal dengan dasar; Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan kota Bandung bidang PNFI tahun 2013, meliputi sebagai berikut: a) Pelaksanaan penyusunan rencana program, serta penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan; b) Pelaksanaan program pengumpulan dan pengolahan data lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan; c) Pelaksanaan kegiatan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan yang meliputi pelaksanaan penyusunan bahan kriteria pendirian, akreditasi dan penyelenggaraan kegiatan kesetaraan serta sosialisasi kebijakan, diseminasi kurikulum nasional/lokal, sistem pengujian dan pembinaan pengembangan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, serta peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup pendidikan anak usia dini atau PAUD dan kesetaraan.

Implementasi Kebijakan

1. Struktur Pelaksana

Struktur pelaksana implementasi kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM terdiri dari : Kepala bidang Pendidikan Non formal Formal dan In formal, kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan kesetaraan, dengan staf bidang PNFI.

2. Tenaga dan Tanggung Jawab

Tenaga dan penanggungjawab terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal, tenaga pembina sebagai nara sumber nya bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, Dirjen PAUDNI, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan kepala dinas pendidikan kota Bandung merupakan penanggung jawab terselenggaranya kegiatan pembinaan, sebagai implementasi dari kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal..

3. Prosedur

Prosedur implementasi kebijakan bidang PNFI dalam menyelenggarakan pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM, dengan penyusunan rencana program, serta penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan; dan pelaksanaan program pengumpulan dan pengolahan data lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan.

4. Mekanisme

Mekanisme pembinaan diselenggarakan setiap tiga bulan sekali atau setahun empat kali. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam program pembinaan adalah; kepala dinas pendidikan kota Bandung, kepala bidang PNFI, kepala seksi PAUD dan kesetaraan. Adapun peserta pembinaan terdiri atas para ketua PKBM dari 31 kecamatan yang ada di kota Bandung, sementara pembinaan secara khusus terhadap para tutor dan ketua PKBM dilakukan bila mana ada program dari pemerintah pusat. Sedangkan kerjasama dalam pembinaan terhadap

PKBM dilakukan dengan perguruan tinggi negeri/ swasta, direktorat jendral pendidikan anak usia dini non formal dan in formal atau Dirjen PAUDNI, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen serta Kementrian Agama atau Kemenag. Mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan non formal dan in formal atau PNFI dilakukan tiga kali dalam satu tahun, dengan waktu pelaksanaan pembinaan antara 1 sampai 2 hari, adapun materi pembinaan kurang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan mutu PKBM, adapun metode pembinaan dilakukan dengan ceramah dengan variasi adanya tanya jawab, serta penugasan-penugasan didukung media lap top dan in focus serta compact disk atau CD.

Masalah yang Dihadapi Bidang PNFI

Ada beberapa masalah yang dihadapi bidang PNFI, antara lain: (a) terbatasnya dana untuk kegiatan penyelenggaraan pembinaan. dan tidak adanya insentif pemerintah bagi penyelenggara PKBM serta tidak ada insentif dari pemerintah untuk para tutor; (b) terbatasnya dana yang bersumber dari APBN pusat maupun yang bersumber dari APBD provinsi dan kota. Selain itu ada juga penyelenggara PKBM dengan fasilitas sarana bangunan dengan status kontrak atau sewa pada pihak lain baik jangka pendek tahunan atau per tiga tahun sekali, juga tidak adanya tutor atau guru tetap pada lembaga pusat kegiatan belajar Masyarakat atau PKBM; (c) banyak pengelola PKBM yang bukan berlatar belakang pendidikan, hal ini akan menyulitkan bidang PNFI untuk dapat memberdayakan pengelola agar lebih

berorientasi untuk meningkatkan mutu; (d) banyak tutor di lembaga PKBM yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan, hal ini akan menyulitkan bidang PNFI untuk dapat memberdayakan tutor agar lebih berorientasi untuk meningkatkan mutu; (e) kurangnya perhatian dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Bandung; (f) kurangnya perhatian dari pihak swasta, tokoh masyarakat dan industri atau perusahaan terhadap pendidikan non formal khususnya lembaga PKBM di kota Bandung; (g). kurangnya perhatian dari pemerintah, swasta, tokoh masyarakat dan industri atau perusahaan terhadap pendidikan non formal khususnya lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di kota Bandung; (h) tidak sesuai kualifikasi pendidikan, hal ini akan menyulitkan pengelola untuk dapat lebih memberdayakan tutor untuk meningkatkan mutu; (i) terbatasnya sarana dan pra sarana untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar; (j) tidak adanya insentif dari pemerintah untuk tutor di PKBM sebagai motivasi untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar; (k) kurangnya kehadiran warga belajar untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.

Upaya Pembinaan PKBM oleh Bidang PNFI

Terhadap masalah di atas, ada beberapa upaya pembinaan yang dilakukan bidang PNFI, antara lain: a) Dengan mengadakan kerjasama melibatkan instansi dari pemerintah/ departemen yang lainnya untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap PKBM untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal khususnya

PKBM; b) Dengan mengadakan kerjasama melibatkan perusahaan-perusahaan swasta atau instansi lain, dengan harapan memperoleh dukungan dana untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap PKBM untuk meningkatkan mutu; c) Dengan menambah penilik atau pengawas kesetaraan, sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dapat terlaksana dengan efektif dan efisien Upaya perbaikan ke depan dengan lebih memberdayakan segala potensi personel yang ada, sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap PKBM dapat terlaksana dengan efektif dan efisien; d) Dengan mengadakan pembinaan yang berkelanjutan dengan dilakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pembinaan.; e) Dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga swa daya masyarakat, sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap PKBM dapat terlaksana secara maksimal, f) Dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan ketua forum PKBM, pengelola PKBM, dan ketua PKBM sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap PKBM dapat terlaksana secara optimal dengan hasil maksimal, g) Dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan unsur media massa dan elektronik sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap PKBM dapat tersosialisasi dan terlaksana sesuai harapan.

Kekuatan dan Potensi Pembinaan oleh Bidang PNFI terhadap PKBM

Berdasarkan data yang dideskripsikan sebelumnya terdapat beberapa aspek kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembinaan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan oleh bidang PNFI untuk

meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM telah dilakukan; b) Anggaran untuk penyelenggaraan pembinaan bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk APBN dan sumber anggaran dari pemerintah daerah APBD; c) Implementasi pembinaan dalam bentuk rapat-rapat, dan pelatihan ditujukan kepada para ketua PKBM dan para tutor sebagai tenaga pendidik di PKBM; d) Kerjasama pada kegiatan pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM oleh bidang PNFI dilaksanakan kerjasama dengan melibatkan unsur dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; e) Adanya penilik kesetaraan yang melaksanakan pembinaan langsung di lapangan kepada PKBM untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal; f) Adanya ketua PKBM dan tutor yang menjadi pendidik di PKBM dan merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan warga belajar di PKBM.

Kecenderungan Ketidakberhasilan Program Bidang PNFI

Secara umum, kecendrungan kurang berhasilnya pembinaan terhadap PKBM oleh bidang PNFI dinas pendidikan kota Bandung untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal, sebagai berikut:

1. Struktur Strategi Kebijakan

Kecenderungan ketidakberhasilan berkaitan dengan stuktur strategi kegiatan, antara lain: (a) Penyelenggaraan pembinaan oleh dinas pendidikan bidang PNFI terhadap PKBM belum berorientasi untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal, (b) Penyelenggaraan pembinaan oleh bidang PNFI belum ada materi atau praktek yang sifatnya

keterampilan kerja yang dapat di implementasikan di PKBM, (c) Penyelenggaraan PKBM belum berorientasi pada kebutuhan pasar/kebutuhan warga belajar setelah lulus, (d) Belum optimalnya PKBM menggali potensi dari warga belajar, yang berhubungan dengan kebutuhan pada dunia industri atau dunia kerja, (e) Belum sinkronnya perencanaan dengan kebutuhan mitra kerja.

2. Struktur Strategi Penyelenggaraan

Kecenderungan ketidakberhasilan selanjutnya adalah berkaitan dengan struktur strategi penyelenggaraan, antara lain: (a) Belum optimalnya bidang PNFI dalam melakukan koordinasi dan pendekatan dengan pengelola PKBM untuk meningkatkan mutu, (b) Masih lemah dalam pendekatan dengan mitra kerja yang saling menguntungkan dan mendukung terhadap program yang dibutuhkan, (c) Kurang peka dalam menganalisis akan kebutuhan mitra kerja yang dapat dilakukan oleh bidang PNFI dan PKBM, (d) Belum dilaksanakan penyusunan program belajar yang diintegrasikan dengan pelatihan kerja/ kecakapan hidup secara kemitraan, (e) PKBM belum berorientasi pada kualitas hasil lulusan/ alumni dengan mutu belajar, sifatnya terbatas dapat menghasilkan lulusan dan memperoleh ijazah, (f) Belum optimalnya kemampuan mengevaluasi terhadap hasil pembinaan oleh bidang PNFI terhadap PKBM untuk meningkatkan mutu, (g) Belum optimalnya kemampuan mengevaluasi terhadap hasil belajar mengajar yang dilakukan oleh pengelola PKBM. (h). Dukungan dana yang kurang memadai baik dari pemerintah pusat

melalui APBN, APBD provinsi serta APBD kota, dan tidak adanya insentif pemerintah bagi penyelenggara PKBM serta tidak ada insentif dari pemerintah untuk para tutor.

Upaya Pengembangan PKBM

Dengan menerapkan program pembelajaran berbasis pemberdayaan oleh pengelola PKBM dan pemberdayaan pada bidang PNFI untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap pendidikan non formal. Program berbasis pemberdayaan yang dimulai dari asumsi-asumsi, prinsip-prinsip dan langkah normatif yang penting adalah: (1) PKBM adalah lembaga pendidikan non formal yang spesifik yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat; (2) PKBM merupakan wadah bagi warga belajar bukan kumpulan orang, kelas, ataupun sarana mobilisasi orang-orang; (3) ada tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan alamiah yang dilalui PKBM sampai lembaga ini produktif dan dapat dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah sehingga menjadi lembaga yang mandiri; (3) proses pembelajaran di PKBM dituntut adanya pendekatan belajar siswa aktif, berpusat pada warga belajar dan bersifat partisipatif; (4) kemampuan mengelola terhadap diri sendiri atau warga belajar dan kelompok merupakan kondisi yang harus terlebih dulu di wujudkan atau diperhatikan, dari pada kegiatan tentang pembelajaran yang berhubungan dengan sejumlah mata pelajaran; (5) belajar yang mandiri dapat menjadi wahana belajar yang efektif untuk pembentukan kepribadian yang disiplin, mandiri,

dan demokratis; (6) warga belajar yang terlatih mengarahkan dan mengelola sendiri aktivitas belajarnya di lembaga PKBM pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mandiri dan dapat mengelola kehidupannya menjadi lebih baik; (7) PKBM yang mandiri akan dapat terwujud apabila faktor-faktor pendukung seperti pengelola, tutor, warga belajar, tokoh masyarakat, pemuka agama, industri atau lembaga swasta, serta unsur pemerintah dalam hal ini bidang PNFI dinas pendidikan kota Bandung, secara kolektif mendukung, membantu dan berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan untuk mewujudkan lembaga pendidikan non formal dalam hal ini lembaga PKBM yang bermutu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (a) kebijakan dinas pendidikan kota Bandung bidang pendidikan non formal in formal (PNFI) untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM dalam bentuk pembinaan, sudah dilaksanakan akan tetapi penyelenggaraan pembinaan kurang berorientasi untuk meningkatkan mutu PKB, (b) implementasi kebijakan dalam bentuk pola pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan kota Bandung bidang PNFI kurang maksimal dilaksanakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal pada PKBM dengan implementasi mengadakan rapat atau pelatihan serta penugasan-penugasan bagi ketua PKBM dan tutor selaku pendidik, hal ini dilakukan setiap empat bulan sekali, (c) faktor penghambat pelaksanaan pembinaan adalah, terbatasnya dana untuk

penyelenggaraan pembinaan yang bersumber dari dana APBN pusat, APBD provinsi maupun dari APBD kota Bandung, dan (d) upaya ke depan untuk lebih efektif dan efisien penyelenggaraan pembinaan dengan melakukan kerjasama antara bidang PNFI dinas pendidikan kota Bandung dengan melibatkan pihak industri atau swasta lainnya untuk memperoleh dukungan dana bagi penyelenggaraan pembinaan.

Selanjutnya, hubungan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam bentuk pembinaan, ternyata menunjukkan hubungan yang signifikan, variabel kebijakan dalam bentuk pembinaan memberikan kontribusi terhadap variabel mutu pendidikan non formal pada PKBM di kota Bandung.

Adapun implikasi dari kebijakan yang kurang berorientasi untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM di kota Bandung, yaitu rendahnya mutu pendidikan non formal pada PKBM sehingga berdampak kurangnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap program pendidikan non formal pada PKBM. Oleh karena itu, diharapkan dinas pendidikan kota Bandung bidang PNFI untuk lebih berorientasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan non formal terhadap PKBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengembangan Kegiatan Belajar. 2001. *Hasil Penelitian Yayasan Swadamas dan UNESCO tentang Layanan Pendidikan Melalui PKBM Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
-

2008. *Tentang Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas.
- Fatah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: P2LPTK, Depdikbud.
- Suciati, Henny. 2011. *Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Bandung: Universitas Islam Nusantara.
- Sudjana, Nana. 1989. *Cara Belajar Siswa Aktif-Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudjana, 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Terry, G. R. 1986. *The Principles of Management (Thrd Edition)*. Homewood Illinois: Richard Irwin.
-